

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2004

Polri masih periksa Presdir Newmont

JAKARTA (Bisnis): Presdir PT Newmont Minahasa Raya (NMR), tersangka Richard Ness, kembali menjalani pemeriksaan lanjutan berkaitan kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat.

"Ness saat ini menjalani pemeriksaan. Masih belum selesai" kata Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Suyitno Landung didampingi Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Paiman dalam jumpa pers, kemarin.

Dalam pemeriksaan pada 23 September 2004 yang berlangsung selama delapan jam itu, tersangka Richard Ness sebenarnya sudah dikatakan ditahan sebagai salah satu tersangka dalam kasus pencemaran Teluk Buyat.

Penahanan terhadap Richard Ness diungkapkan Direktur V Tindak Pidana Tertentu Suharto pada pk. 18.00 hingga pk.21.30 WIB. Namun pada pk. 22.00 WIB, tersangka diizinkan pulang karena terganggu kesehatannya.

Suyitno membantah penundaan penahanan terhadap tersangka Richard Ness karena adanya intervensi negara asing. Menurutnya, tim penyidik memproses seluruh tersangka kasus pencemaran Teluk Buyat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dia menjelaskan penundaan pemeriksaan Richard Ness dilakukan karena yang bersangkutan harus ditangani tim dokter. "Pemeriksaan terhadap Ness masih dilanjutkan sekarang. Pemeriksaan tadi malam terpaksa ditunda karena kesehatannya terganggu," ungkapnya.

Polri hingga saat ini, telah menahan

lima karyawan PT NMR sebagai tersangka, yaitu Manajer Pengawasan dan Produksi, Phil Turner, Manajer Eksternal, David Sompie, Kepala Pengawas Lingkungan, Jerry Kojansow, Kepala Pengawas Pengolahan Limbah, Putra Wijayatri, serta Manajer Lokasi William Long.

Rekaman kesehatan

Sementara itu, salah seorang dari delapan penasehat hukum tersangka Richard Ness, Luthfi Yazid mengemukakan kliennya diminta untuk menyerahkan *medical record* hasil pemeriksaan kesehatannya kepada tim penyidik yang memeriksanya dalam kasus pencemaran Teluk Buyat.

"Penyidik yang memeriksa klien saya meminta agar Richard Ness menyerahkan hasil rekaman kesehatannya pada pemeriksaan Senin pekan depan," kata pengacara Luthfi Yazid yang mendampingi dalam pemeriksaan.

Permintaan untuk menyerahkan rekaman kesehatan itu, lanjut Luthfi, menyusul keluhan Bos Newmont itu yang mengalami gangguan kesehatan pada saat menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Menurut Luthfi, kliennya hanya diperiksa mulai pk.09.00 hingga pk.12.00, tetapi karena kondisi kesehatannya belum membaik, maka tim penyidik urung melanjutkan pemeriksaan terhadap tersangka Richard Ness.

Penyakit yang diderita tersangka Richard Ness, kata Luthfi, karena terdapat pembengkakan di sekitar jantungnya, sehingga harus melalui therapy khusus yang disebut Low Blood Pressure atau melalui operasi jantung. "Kedua langkah pengobatan itu yang harus dijalani Richard Ness, sehingga perlu perawatan khusus."

Sementara itu, Kedubes Amerika Serikat dalam siaran persnya mengemukakan proses penahanan terhadap para tersangka kasus pencemaran Teluk Buyat hanya akan mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Selama pemeriksaan PT Newmont sudah sepenuhnya kooperatif dan telah mengizinkan karyawannya membantu pihak berwenang Indonesia. PT Newmont sudah menjamin mereka untuk terus bekerjasama. "Penahanan fisik atas karyawan Newmont tidak diperlukan," demikian siaran pers tersebut.

Rencananya, kemarin, Mabes Polri hendak meminta keterangan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabeli Marikam berkaitan kasus pencemaran lingkungan Teluk Buyat. Namun, permintaan keterangan terhadap Nabeli belum dapat dilaksanakan karena tim penyidik belum memperoleh izin Presiden Megawati Soekarnoputri untuk meminta keterangan Nabeli.

Berkaitan perkembangan proses hukum kasus pembobolan dana Bank BNI senilai Rp1,7 triliun, Mabes Polri masih menunggu untuk menyerahkan tersangka Adrian Waworuntu ke Kejaksaan DKI Jakarta karena masih dalam perawatan dokter di Manado, Sulut.

"Pemanggilan paksa tidak jadi dilakukan polisi karena penasihat hukumnya menyampaikan pesan bahwa tersangka Adrian menderita sakit dan perlu istirahat tujuh hari," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Paiman kepada pers, kemarin.

Menurut dia, penundaan upaya paksa itu merujuk pada surat keterangan dokter yang memeriksa Adrian. "Jadi kami memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan polisi sebelum diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta." (et)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>APR</th><th>MEI</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGST</th><th>SEPT</th><th>OKT</th><th>NOV</th><th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </tbody> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 16																																												
TAHUN 2004																																												

Polri Bantah Intervensi AS dalam Kasus Buyat

Jakarta, Sinar Harapan

Mabes Polri, Senin (27/9) pagi, membantah adanya intervensi Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyusul pemeriksaan serta penyidikan terhadap Presiden Direktur PT Newmont Minahasa Raya (NMR), Richard B. Ness.

Penegasan itu disampaikan Kabareskrim Mabes Polri Komisariss Jenderal (Komjen) Suyitno Landung ketika dihubungi SH, Senin pagi, menanggapi pernyataan Kedutaan Besar AS di Jakarta yang menilai penahanan sejumlah pejabat PT NMR dalam kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat dapat merusak iklim investasi.

Suyitno Landung mengatakan tidak ada intervensi

dari pemerintah asing apalagi untuk mempengaruhi penyidik dalam kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat, Sulawesi Utara (Sulut). "Biarlah penyidik yang melakukan semuanya. Jangankan pemerintah asing, saya selaku Kabareskrim serta Kapolri dan petinggi-petinggi lainnya tidak berhak mencampuri tentang penyidikan terhadap penyidik," katanya.

Hingga kini menurutnya sudah ada lima orang yang dita-

han dalam kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat. Kelimanya adalah David Sompie, Jerry, Putra Wijaya, Pilturmer, serta Bilong. Kelima orang PT Newmont ini ditahan sejak dirinya dinyatakan sebagai tersangka terkait kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat.

Setelah itu, pihak penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mabes Polri kembali memeriksa Presiden Direktur PT NMR, Richard B. Ness yang dianggap mengetahui tentang pencemaran lingkungan di Teluk Buyat pada Kamis (23/9) lalu bahkan sudah dinyatakan sebagai tersangka. Namun Richard B. Ness tidak ditahan karena menyatakan siap memenuhi panggilan pihak penyidik jika diperiksa kembali.

Dia juga menyatakan tidak akan menghilangkan barang bukti.

Menurut Direktur Tipikor Mabes Polri Brigjen Suharto, tersangka Richard B. Ness tidak perlu ditahan. Namun yang jelas, Richard bersedia untuk dipanggil dan diperiksa kembali. Suharto pun menegaskan pemeriksaan terhadap Richard tidak ada intervensi dari orang atas.

Rumor yang beredar menyebutkan pemeriksaan dan penahanan terhadap Richard B. Ness diduga kuat telah diintervensi Duta Besar Amerika Serikat yang langsung menghubungi Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar. Kapolri selanjutnya memerintahkan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Suyitno Landung untuk tidak menahan Presdir PT NMR. (han)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input checked="" type="checkbox"/> UMUM										
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 7											
TAHUN 2004											

'Amerika jangan mendua dalam kasus Teluk Buyat'

JAKARTA (Bisnis): Pemerintah AS diminta agar tidak menerapkan standar ganda dalam kasus pencemaran di Teluk Buyat yang diduga berasal dari limbah PT Newmont Minahasa Raya (NMR).

Iskandar Sitorus, Ketua pendiri Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK), menegaskan pemerintah AS harus tetap memegang komitmennya dalam menyikapi dugaan kasus pencemaran tersebut.

"Kita mempertanyakan komitmen Pemerintah AS yang pada awal kasus Buyat ini menyatakan tidak akan mencampuri penyelidikan yang dilakukan oleh Polri," katanya di Mabes Polri, kemarin.

Intervensi yang dipersoalkan LBHK, tutur Iskandar, adalah menyangkut pernyataan penyesalan oleh Kedubes AS di Jakarta terhadap penetapan status enam karyawan NMR sebagai tersangka dan penangkapan mereka.

Dua di antara enam tersangka berwarga negara AS yakni Richard Ness (presdir) dan Phil Turner (manajer Pengawasan dan Produksi).

LBHK juga mencurigai adanya upaya dari kantor pusat Newmont yang berlokasi di Denver, AS untuk mendatangi Teluk Buyat dan mengiming-imingi masyarakat setempat dengan sejumlah uang agar mereka mau direlokasi, tetapi dengan persyaratan mereka harus mencahut gugatan terhadap perusahaan tambang tersebut.

Mengenai tindakan Polri yang mem-

batalkan penahanan Richard Ness dengan alasan gangguan kesehatan, Iskandar mengatakan agar lebih adil seharusnya Polri membuktikan alasan gangguan kesehatan tersebut melalui pemeriksaan kesehatan Neiss di rumah sakit Polri, Kramat Jati.

"Selanjutnya kalau memang nanti dari rumah sakit Polri Ness dinyatakan sakit dan mendapatkan rujukan, ya... silakan saja," tegasnya seperti dikutip Antara.

Dilepas lagi

Richard Ness menjalani pemeriksaan maraton di Mabes Polri Kamis pekan lalu. Tapi malamnya ia dilepaskan. Keesokan harinya ia juga menjalani pemeriksaan, namun kembali dilepaskan oleh Mabes Polri dengan alasan gangguan kesehatan.

Lima tersangka lain dari NMR yang telah ditahan adalah Phil Turner, David Sompie (manajer eksternal), Jerry Kojansow (kepala pengawas lingkungan), Putra Wijayatri (kepala pengawas pengolahan limbah) serta William Long (manajer lokasi).

Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro Penangkapan terhadap eksekutif NMR akan mempengaruhi investasi tambang dari AS di Indonesia.

"Dalam laporannya tadi mereka menyatakan kepada Presiden bahwa masalah ini akan berdampak pada iklim investasi Amerika di Indonesia," tuturnya seusai mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan dengan Dubes AS Ralph L. Boyce.

Bahkan, menurut Purnomo, Dubes

AS dan Dubes Australia akan mendatangi Mabes Polri berkaitan penahanan eksekutif NMR tersebut.

Menyinggung penyidikan kasus dugaan pencemaran Teluk Buyat, dia menjelaskan kini sudah ada tim gabungan dari departemen teknis yang menyelesaikan masalah pencemaran itu. Hasil kajiannya akan dilaporkan kepada presiden dalam beberapa hari ini.

"Jadi tim gabungan yang dipimpin langsung oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup ini akan melaporkan hasil kajiannya kepada Ibu [presiden]."

Pembentukan tim gabungan tersebut merupakan hasil keputusan Rakor bidang Polkam dan Kesra beberapa waktu lalu. Tim tersebut akan mengkaji masalah kasus Teluk Buyat sesuai ketentuan pertambangan yang berlaku.

Seusai bertemu Kepala Negara, Ralph L. Boyce menyatakan keprihatinannya mengingat masih ada satu warga negara AS yang ditahan.

"Kami prihatin mengingat warganegara saya: Karena ini adalah perusahaan Amerika dan proses penyelidikan masih berlangsung. Kami merasa hal tersebut tidak pantas dilakukan," ujarnya.

Namun Dubes AS optimistis bahwa kerja sama dengan pemerintah Indonesia akan berhasil mencapai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah Teluk Buyat tersebut.

"Investasi di Indonesia sangat penting dan saya percaya bahwa Indonesia masih tempat yang baik dan prospek untuk industri dari dalam negeri dan luar negeri," kata Boyce. (06/dle/iz)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>APR</th><th>MEI</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGST</th><th>SEPT</th><th>OKT</th><th>NOV</th><th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </tbody> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN: 1																																												
TAHUN 2004																																												

Dubes AS Samperin Mabes Polri Boyce Ikut Campur Kasus Teluk Buyat

Jakarta, RM. Duta Besar Amerika Serikat (Dubes-AS) Ralph L Boyce memang nekad. Meski gagal menemui Kapolri Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, Boyce tetap minta Polri agar menanggulangi penahanan—seorang warga AS— yang terkait kasus pencemaran Teluk Buyat oleh perusahaan tambang raksasa AS PT Newmont Minahasa Raya (NMR). Salah satunya, Presdir Newmont Richard B Ness, yang Jumat lalu sempat ditahan.

Saat datang ke Mabes Polri, Boyce didampingi Public Affairs Concendor Charles Silver dan Konselor Kedubes Australia, Graham Swiff yang seorang warganya ikut ditahan bersama tiga WNI lain.

Permintaan penanggungan penahanan itu rada aneh. Sebab, ketika memberi keterangan pada wartawan —usai menjenguk tahanan di sel Mabes

Polri—, Boyce menyangkal bila kunjungannya itu dikategorikan sebagai intervensi AS terhadap proses hukum yang tengah dituntaskan oleh Mabes Polri.

Meski demikian, toh di sisi lain Boyce justru minta polisi agar memberikan penanggungan penahanan terhadap para tersangka kasus Buyat. Untuk itu, dia pun menggaransi bahwa para tersangka tidak akan kabur alias melarikan diri.

"Pertama-tama, tidak ada intervensi dalam bentuk apa pun. Kami menghormati prosedur hukum di Indonesia dan seiring berjalannya proses hukum ini, kami mengharapkan ada penyelesaian yang pantas. Tidak ada tekanan apa pun. Kami ke sini

bukan untuk melakukan tekanan," kelitanya menjawab tuduhan yang dilontarkan wartawan.

Menanggapi intervensi AS terhadap kepolisian, Dewan Pendiri Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBH-K) Iskandar Sitorus meragukan hal itu. "Kami himbau agar Dubes AS menghentikan langkah-langkah yang telah diambil," katanya. Dia menilai, fakta yang dikemukakan Dubes AS seputar pengungkapan kasus Newmont bakal mempengaruhi iklim investasi jelas merupakan indikasi intervensi.

Menanggapi kabar adanya intervensi Dubes AS ini, Direktur V Tindak Pidana Tertentu Bareskrim (Dir V-Tipiter) Mabes Polri Brigjen Suharto mengatakan, dalam penyelidikan kasus ini tidak ada intervensi dari pihak manapun. Lebih lanjut,

saat disoal tentang tidak ditahannya Presiden Direktur NMR Richard Ness, jenderal bintang satu ini menyatakan yang bersangkutan mengidap sakit jantung.

Sebelumnya, terhitung Kamis (23/9) malam, polisi sempat menahan enam tersangka kasus dugaan pencemaran Teluk Buyat.

Keenam tersangka itu adalah Presiden Direktur Richard B Ness; Manajer Maintenance dan Produksi Phil Turner; Manajer Eksternal David Sompie; Superintendent Pengolahan Limbah Putra Wijayatri; Superintendent Environment Jerry Kojansow, dan Site Manager William Long. Namun malam harinya, Mabes Polri ternyata melepaskan Presdir Newmont itu dengan alasan Richard Ness sering mengeluh sakit perut. ■ GPG

38

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 **28** 29 30 31
HALAMAN : 1
TAHUN 2004

Dubes AS Pertanyakan Kasus Newmont kepada Presiden

JAKARTA — Duta Besar Amerika Serikat Ralph L. Boyce mempertanyakan penanganan kasus dugaan pencemaran Teluk Buyat di Sulawesi Utara oleh PT Newmont Minahasa Raya kepada Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Boyce datang untuk menanyakan (kepada Presiden) masalah Newmont," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro setelah mendampingi Presiden dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Purnomo menjelaskan, pertanyaan Boyce khususnya berkaitan dengan adanya warga

negara AS yang dijadikan tersangka dan ditahan kepolisian. Menurut dia, meski penahanan Presiden Direktur Newmont Minahasa Raya Richard B. Ness ditangguhkan, Boyce masih mempertanyakan penahanan warga negara AS lainnya, William Raymond Long, dan seorang warga negara Australia.

Dalam pertemuan itu, kata Purnomo, Boyce pun sempat menyampaikan kepada Presiden bahwa penahanan akan berdampak buruk bagi iklim investasi di Indonesia. Menanggapi itu, menurut Purnomo, Presiden berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut secepatnya.

Namun, Purnomo membantah kedatangan Boyce merupakan bentuk intervensi AS terhadap proses hukum di Indonesia. "Tidak ada tekanan," ujarnya.

Untuk mengusut tuntas kasus itu, pada Rabu pekan lalu tim penyidik polisi menahan empat tersangka, yaitu David Sompie, Jerry Kojansow, Putra Wijayantri, dan seorang warga negara AS William Raymond Long. Belakangan, Phill Turner yang berkewarganegaraan Australia juga ditahan.

Ness sempat dikabarkan akan langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama delapan jam, Kamis lalu. Na-

mun, penahanannya ditangguhkan dengan alasan kesehatan.

Seusai pertemuan dengan Presiden, Boyce menyatakan, pemerintahnya menaruh perhatian besar terhadap kasus itu dan menilai penahanan terlalu berlebihan. Berbeda dengan Purnomo, Boyce menyatakan terlalu dini untuk menilai kasus itu bakal mempengaruhi minat investasi AS di Indonesia.

"Saya percaya investasi di Indonesia tetap mempunyai prospek yang baik," kata Boyce.

Selain bertemu dengan Presiden, Boyce kemarin menjenguk para tersangka di Mabes Polri. Konsul Australia Graham

Swift juga ikut menjenguk tahanan. Boyce meminta polisi membebaskan para tersangka dari tahanan dan menjamin mereka tak akan melarikan diri. "Saya harap (mereka) dapat keluar segera," ungkapnya.

Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan menuding Kedutaan Besar AS telah mengintervensi penyidikan polisi dalam kasus itu. Ketua LBH Kesehatan Iskandar Sitorus menandakan, masalah hukum dan investasi merupakan dua persoalan berbeda. "Di Amerika sendiri, kalau ada upaya hukum terhadap investor, tidak ada intervensi seperti yang mereka lakukan,"

ujarnya. Karena itu, ia berharap, Kedubes AS tetap memegang komitmen untuk tidak mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung.

Menanggapi hal itu, Boyce membantah telah melakukan intervensi. Ia pun menegaskan, mendukung penyelidikan di Mabes Polri.

Hal serupa diungkapkan Direktur V Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri Brigjen Suharto. "Tidak ada intervensi (Amerika)," katanya, "(penyidikan) jalan terus." ● yura s/sapto p/martha w

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 **28** 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2004

U.S. asks for release of Newmont staff

Abdul Khalik and
Fabiola Desy Unidjaja
The Jakarta Post/Jakarta

American Ambassador Ralph L. Boyce held talks with President Megawati Soekarnoputri and the police on Monday as Washington aired concerns over the detention of five executives of United States-based Newmont Minahasa Raya mining company.

During nearly one hour of discussion with the President at the palace, Boyce said he had expressed concern about the detention of the Newmont employees, including one U.S. national.

"We are worried about why they should be detained and we don't think that's appropriate. But we are working with friends and I am sure we will come out with a good resolution," Boyce told journal-

ists after the meeting.

Despite being cooperative with the police in their investigation into alleged pollution in Buyat Bay in North Sulawesi, the police took American site manager Bill Long, Australian production and maintenance manager Phil Turner and Indonesian external relations manager David Sompie, superintendent of environment Jerry Kojansow and superintendent of waste processing Putra Wijayantri into custody.

Newmont's president Richard B. Ness has also been named a suspect but has avoided detention so far due to health concerns.

Boyce said it was still premature to conclude that the case would drive American business away from the country, saying that Indonesia remained a good and prospective place for industry.

After visiting the five

detainees at police headquarters, Boyce told reporters that the embassy did not intend to intervene in the legal process.

"There is no intervention of any kind. Obviously, we respect the Indonesian procedure and I am quite sure that as the procedure moves forward, there will be an appropriate outcome," said Boyce.

He added that he came to police headquarters simply to visit the U.S. citizen and employees of the U.S. company.

Boyce said the appropriate action to be taken now was to have the Newmont executives released from detention.

"We do not believe these five are a threat. Newmont has been very actively supporting the investigation into the allegations ... and our view is that there is no real need for the five individuals to be detained," he said.

"And hopefully that will be

the ultimate disposition of their formal request that they made through Newmont, that the detention be suspended as soon as possible."

According to procedural law, the police may detain a suspect if they are of the opinion that the suspect is not being cooperative, may attempt to destroy evidence, or their are strong indications that he will abscond.

The National Police's director of specific crimes, Brig. Gen. Suharto, said it was easier for the police to question the suspects if they were all detained as they wouldn't have to send out summonses every time they needed them.

Minister of Energy and Mineral Resources Purnomo Yusgiantoro said the President would only receive the report of the joint team investigating the case in the next couple of days.

410

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>APR</th><th>MEI</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGST</th><th>SEPT</th><th>OKT</th><th>NOV</th><th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </tbody> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 6																																												
TAHUN 2004																																												

If only Newmont

With extraordinary swiftness the National Police are pursuing the alleged pollution case in Buyat Bay, North Sulawesi. Unswayed by initial dismissals from government officials about the reported pollution, police have conducted their own investigation and within weeks of the final results which — reportedly — confirm the pollution, hastily declared six officials of Newmont Minahasa Raya as suspects in the case.

Five company officials are being held in custody, with a sixth — company boss Richard Ness — released for medical reasons.

Police thus far seem to have remained faithful to their jurisdiction. Their actions have been conducted in accordance with existing laws regulating the detention of suspects.

The expeditious response of police to this case should be commended. That said, something remains amiss if we compare their diligence in this case to other high-profile investigations.

If only police would pursue other cases with the same persistence they have with Newmont, then many accused of graft still on the loose would now be incarcerated.

If only detectives conducted investigations of crimes in the capital with similar zeal as they have ascertaining evidence of a case in a region more than 2,000 kilometers away, then there would probably be no erosion of confidence in the force.

If only Newmont, then there is something definitely wrong with the police force entrusted to oversee our civil society.

The development of the pollution case against Newmont Minahasa Raya borders on the bizarre. When NGOs initially claimed that residents of Buyat Bay were suffering from Minamata disease, many were shocked. The outbreak of the disease would have meant severe levels of mercury poisoning. There were claims that the mercury resulted from Newmont's tailings.

Several ministers dismissed these claims and Newmont repeatedly insisted it did not use mercury in its prospecting or disposal process.

Later tests from a leading university and police found that while residents did not suffer Minamata disease, there were traces of mercury found in the Bay which, allegedly, were above the standard level set by the government for seawater pollution.

One point of contention now is the exact baseline standard of mercury in the water in Buyat Bay and blood levels of victims allegedly suffering from poisoning. Newmont claims that samples tested by third-party laboratories met world standards.

This case is yet another test for our police. We do not wish to impinge or influence their investigations in any way other than to encourage them to conduct themselves in a proper manner. Neither should the police or government be swayed by remarks from high-ranking U.S. officials or suggestions by Newmont's home office that prosecution could deter foreign investment.

Guilty is guilty, foreign or local. Indonesia has a right to uphold its laws. But this must be conducted under the caveat that if there is evidence against Newmont Minahasa Raya it must be irrefutable and presented in the most transparent manner.

Even if Newmont is eventually exonerated, police must get down to who is exactly responsible for the contamination of Buyat Bay. We cannot afford to let the case linger and fade to become another tall-tale of conspiracy.

Failure to resolve the matter openly would only reinforce Indonesia's image as an unsafe country where the sanctity of contracts and the law are not respected, but a place where local officials may get away with attempted extortion.

Rumors of locals trying to extract money before the closure of Newmont Minahasa Raya's operations; illegal miners irresponsibly using mercury and arsenic; or political jostling over potential shares in Newmont's other major gold and copper operation in Nusa Tenggara, should be laid to rest.

Common sense should also prevail in the police's investigation. As noted earlier, police may very well be within their rights to seek the detention of senior Newmont Minahasa Raya officials named suspects, but we question the urgency of their incarceration.

Some of them are recognized individuals in society. It is questionable they would go so far as to flee investigation or attempt to impede investigations by destroying evidence — the usual grounds for seeking the detention of a suspect.

A major company, Newmont would only do harm to its own reputation if it attempted to foil investigations. We know Newmont is here prospecting in Indonesia for the long haul, and trust management are aware that if criminal proceedings are needed they would cooperate as such.

We only hope the police have the same long-term vision and their investigations are conducted to abet the safety of the environment based on clear evidence, not short-term political gains.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input checked="" type="checkbox"/> UMUM										
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 34											
											TAHUN 2004

Tentang Tanah yang Terenggut...

MATANYA nanar memandang kemilau cahaya lampu-lampu pabrik PT Newmont Minahasa Raya nun di atas bukit. Saat yang sama, pikirannya menerawang ke tahun 1994, awal ketika tanahnya "dirampas" karena masuk dalam wilayah kontrak karya perusahaan pertambangan itu.

"Di sana hanya ada kebohongan," ujar lelaki itu pada suatu malam di pekan terakhir Agustus 2004, menjelang mesin pabrik PT NMR dimatikan. "Sejak Newmont baru mau masuk ke sini sampai sekarang, saya hanya mendapat ganti rugi Rp 250 untuk setiap meter persegi tanah saya yang diambil perusahaan."

Lelaki berusia 36 tahun itu meminta namanya dirahasiakan, lalu meneruskan cerita tentang sebidang kebun cengkehnya yang rata digusur bulldoser. "Pohon cengkeh dan kelapa kami dibabat habis untuk pertambangan itu. Bulldoser yang mereka gunakan dioperasikan orang berseragam tentara dengan penutup wajah. Akan tetapi kemudian ketahuan, ternyata operator bulldoser itu warga kampung ju-

ga yang diberi seragam tentara untuk menakut-nakuti kami," tuturnya.

Sebelum penggusuran, menurut warga Ratatotok itu, masyarakat didatangi oleh tim yang berasal dari unsur pemerintah dari tingkat provinsi hingga desa yang dipimpin seorang tentara berpangkat kolonel. Mereka memaksa warga pemilik tanah untuk menerima pembayaran ganti rugi yang ditetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Sulawesi Utara, Rp 250 per meter persegi. Padahal sebelumnya, pihak PT NMR menghargai tanah warga Rp 2.500 per meter persegi. Sedangkan setiap pohon kelapa dan enau dihargai Rp 25.000, tanaman kopi, kakao, dan cengkeh diganti Rp 3.000 per pohon.

"Tentara itu bilang kepada warga, hak kalian hanya sebatas yang ada di atas tanah. Silakan ambil semua itu tanaman kalian. Seluruh yang ada di dalam perut Bumi adalah milik negara," kata warga itu yang kini membuka warung makan.

Sebuah laporan yang dibuat organisasi nonpemerintah (ornop) Kelola, menye-

butkan bahwa warga korban penggusuran pernah menempuh upaya hukum dengan menggugat PT NMR melalui Pengadilan Negeri Tondano. Inti gugatan adalah meminta ganti rugi sebesar Rp 5.000 per meter persegi untuk tanah yang bersertifikat. Akan tetapi, putusan sela pengadilan menolak gugatan warga dan memberi izin kepada perusahaan untuk terus melanjutkan kegiatannya di lokasi kebun warga yang disengketakan.

Para penggugat mengajukan banding tanpa didampingi pengacara. Sementara proses banding digelar di Pengadilan Tinggi Manado, kebun warga telah diratakan bulldoser dan tanamannya telah hilang. Pengadilan Tinggi Manado memutuskan perkara itu tidak dapat diterima (*niet otvankelijkhheid* atau NO).

Warga pernah mengadukan masalah tanah tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun setelah menurunkan tim untuk investigasi ke lapangan, Komnas HAM menyimpulkan tidak terjadi pelanggaran HAM.

(LAM)

42

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 **28** 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2004

Penahanan Pejabat Newmont Ditangguhkan

Dubes AS Membantah Intervensi Kasus Buyat

JAKARTA, (PR).-

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Ralp L. Boyce membantah telah mengintervensi penyidikan kasus pencemaran Teluk Buyat Sulawesi Utara, walaupun mengusulkan penyidik untuk menangguhkan penahanan mereka. Bantahan itu disampaikan usai menemui lima tahanan kasus pencemaran tersebut di ruang tahanan Badan Reserse dan Kriminal Polri, Jln. Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (27/9).

Sebelumnya, pada hari yang sama Boyce sengaja menemui Presiden Megawati di Istana Negara guna mempertanyakan penahanan warganya. "Kami baru saja mendiskusikan masalah Newmont. Kami prihatin terhadap warga negara saya, karena ini perusahaan AS, dan penyelidikan sedang berlangsung. Kami khawatir dengan penahanan yang sekarang sedang berjalan. Kami merasa itu tidak pantas dilakukan," kata Boyce usai bertemu Mega.

Lima tersangka yang ditahan sejak awal September 2004 semuanya pejabat PT Newmont Minahasa Raya, yaitu Phil Turner (Manajer Perbaikan Lingkungan), David Sompie (Manajer Hubungan Eksternal), Jerry Konjongsow (Manajer Lingkungan Hidup), William Bill Long (Manajer Proyek Bill Long), dan Putra Wijayanti (Pengawas Bagian Produksi PT NMR). William Bill Long meru-

pakannya warga AS yang ditahan. Sedang Presiden Direktur PT Newmont, Richard Bruce Ness yang juga berstatus tersangka tidak ditahan dengan alasan sakit.

Ralf Boyce didampingi sejumlah staf Kedubes AS, menemui lima tahanan tanpa didampingi pejabat Mabes Polri. Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar berada di markasnya, tetapi memimpin rapat seluruh pejabat teras Mabes Polri.

Menjawab pertanyaan wartawan usai menemui para tahanan, Ralp Boyce menyatakan kedatangannya tidak mengintervensi kerja penyidik.

"Kami ke sini hanya menjaga warga negara AS yang menjadi prioritas utama dari tugas kedutaan, sebab salah satu dari lima tahanan adalah warga AS. Kami menghormati proses hukum, yakin dengan prosedur yang dijalani (polisi) Indonesia," katanya.

Boyce berpendapat, ada cara penyelesaian terbaik dalam kasus ini. Namun ia tidak menjelaskan cara terbaik dimaksud. Hanya, ia mengusulkan agar penahanan kelimanya ditangguhkan.

"Solusi terbaik pasti ada. Seperti saya katakan seminggu yang lalu, kami tidak percaya lima orang yang ditahan akan meninggalkan Indonesia. Kami rasa kelima orang itu tidak perlu ditahan. Usulan kami, penahanan itu ditangguhkan.

(Bersambung ke hlm 14 klm 7)

43

Dubes AS Membantah

(Sambungan dari hlm 1 klm 2)

Mudah-mudahan permohonan penangguhan penahanan oleh (pengacara) PT Newmont bisa dikabulkan. Proses itu harus diurus melalui jalur yang ada," tegas Ralp Boyce.

Ditanya pengaruh minat investor asing, terutama dari AS, setelah Polri mengungkap pencemaran Teluk Buyat, ia menyatakan tidak ada pengaruh negatif. Menurutnya, AS adalah pendukung investasi di Indonesia agar tetap berkembang. "Kami yakin kasus ini tidak menghambat investasi," katanya.

Ia menegaskan investor tetap banyak datang walaupun beredar opini di masyarakat di sini tentang ketakutan investor asing mena-

namkan lagi modalnya di Indonesia. "(Pendapat) kami bertentangan dengan opini di Indonesia," katanya.

Demikian halnya pengaruh kerja sama AS dengan Indonesia, terutama dengan Polri, dinyatakan tidak ada masalah. Apalagi, selama ini AS telah banyak mendukung Polri dalam mengungkap kasus-kasus besar seperti bom Bali dan Hotel JW Marriott. Tentang kehadirannya di Mabes Polri tanpa didampingi Kapolri Jenderal Pol. Da'i Bachtiar, Ralp Boyce menyatakan telah menghubunginya sebelum datang. Namun, karena Kapolri sibuk memimpin rapat, ia mengaku bisa memaklumi.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro dalam pertemuan antara Boyce dan Presiden Megawati, membenarkan bahwa Boyce menanyakan soal warganya yang ditahan dalam kasus tersebut. Dijelaskan, sampai sekarang masih ada satu warga AS dan satu warga Australia yang ditahan.

"Nanti saya bersama Dubes AS dan Australia akan ke Mabes Polri untuk membahas hal tersebut. Sekarang ini telah dibentuk Tim Investigasi yang dipimpin oleh Menneq LH. Tim ini dulu dibentuk berdasarkan Rakor Polkam. Tadi Presiden sudah mendengarkan laporan dari Menko Polkam. Jadi, karena ini menyangkut AS dan Australia, maka akan diselesaikan secepatnya," katanya. (A-84/A-78)***

63

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 INVESTOR IND.

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2004

Bisnis angkutan curah RI masuk babak baru

JAKARTA (Bisnis): Indonesia memasuki babak baru dalam bisnis jasa penanganan muatan curah batu bara melalui angkutan laut, menyusul ditemukannya kontrak pembelian *floating crane* ketujuh dan tiga set *tug & pusher boat* (enam kapal) oleh PT Warisan Nusantara dari Kanmon Kawan Jepang kemarin.

Dirut PT Warisan Nusantara Peter Adamy mengungkapkan penandatanganan kontrak pembelian senilai US\$20 juta itu dilakukan di Bali dan merupakan yang pertama di Indonesia untuk menangani muatan curah, khususnya batu bara, dengan kapasitas 3.000 ton per jam.

"Seperti enam unit sebelumnya, yang terbaru ini juga dioperasikan di kawasan Pulau Kalimantan. Ini merupakan babak baru di bisnis tersebut," ujarnya kepada *Bisnis* melalui telepon kemarin.

Menurut dia, *floating crane* ketujuh ini dipastikan hanya membutuhkan waktu sekitar 20 jam untuk menangani pemuatan batu bara ke kapal jenis Panamax (60.000 ton), sehingga akan menciptakan efisiensi, produktivitas, dan daya saing armada nasional.

Tentang tiga set *tug & pusher boat* (tiga kapal tunda

dan tiga kapal pendorong), Peter memastikan akan menggunakan bendera Indonesia dan akan berfungsi sebagai pengumpul bagi kapal-kapal tongkang (*barge*) batu bara nasional, sebelum berlayar ke manca negara dengan kapal-kapal sekalas Panamax (120.000 ton) atau bahkan Cape Size (150.000 ton-180.000 ton).

"Inisiatif kami ini hendaknya dimanfaatkan pelayaran nasional untuk menyiapkan kapal *feeder* tongkang dengan kapasitas maksimal 8.000 ton batu bara. Ini juga untuk mendukung Inpres Pelayaran, yang sedang disiapkan pemerintah, khususnya dalam pengadaan armada kapal."

Azas cabotage

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pelayaran Niaga Indonesia (INSA) Oentoro Surya mengungkapkan prakarsa PT Warisan Nusantara akan sangat membantu upaya menerapkan azas *cabotage* (muatan domestik harus diangkut kapal nasional) dalam angkutan batu bara.

Selain itu, lanjutnya, juga akan membantu upaya INSA untuk mendongkrak pangsa pelayaran nasional, yang saat

ini baru 20% dari total potensi muatan batu bara nasional sekitar 120 juta ton per tahun.

Dominasi asing itu, lanjutnya, bukan hanya karena keterbatasan armada kapal tongkang batu bara nasional, tapi juga karena tingkat efisiensi dan produktivitas yang belum mencapai titik optimal dalam penanganan muatan batu bara di pelabuhan atau terminal.

"Inisiatif pengadaan set *tug & pusher boat* dan *floating crane* ini pasti akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas nasional, sehingga akan meningkatkan daya saing pelayaran nasional dan industri batu bara di kancah internasional."

Menurut dia, *ship call* dari kapal-kapal induk batu bara akan meningkat melalui pengadaan fasilitas itu.

"Pasokan tongkang batu bara juga akan terpicu, sehingga muatan domestik dapat lebih cepat dikuasai pelayaran nasional."

Saat ini pengapalan (*ship call*) internasional batu bara dari Indonesia terjauh ke Rotterdam dan AS menggunakan kapal induk asing. "Ini pasti berubah," kata Oentoro kepada *Bisnis*. (ins)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>APR</th><th>MEI</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGST</th><th>SEPT</th><th>OKT</th><th>NOV</th><th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </tbody> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 5																																												
TAHUN 2004																																												

Harga Minyak Hantui Pasar Uang dan Saham di BEJ

JAKARTA — Harga minyak dunia yang terus melonjak mendekati level US\$ 50 per barel, ikut menghantui pasar uang dan pasar saham di dalam negeri.

Rupiah bahkan sempat mendekati Rp 9.200 per dolar AS di sesi pagi, tetapi akhirnya ditutup Rp 9.151 per dolar AS atau melemah 41 poin dibanding posisi Jumat (24/9) yang mencapai Rp 9.110 per dolar AS. Pergerakan kurs rupiah di pasar uang Jakarta ini mengikuti tren mata uang regional yang melemah terhadap dolar AS, lebih karena keemasan melonjaknya harga minyak dunia.

Begitu pula dengan indeks saham di Bursa Efek Jakarta yang dilanda aksi ambil untung, juga karena kekhawatiran investor akan terus melambungnya harga minyak dunia yang akan berdampak pada ekonomi global dan regional. Akibatnya, indeks ditutup turun 4,239 poin (0,52 persen) ke posisi 815,582 dengan volume 1,56 miliar saham senilai Rp 856,4 miliar.

Menurut analisis *treasury* PT Bank Permata Tbk. Aries Setiawan, rupiah melemah karena dipicu kenaikan harga minyak yang mencapai US\$ 49,40 per barel. "Melonjaknya harga minyak ini dikhawatirkan membuat subsidi bahan bakar minyak (BBM) kian membengkak dari membebani defisit anggaran

Meskipun demikian, menurut dia, rupiah berpeluang menguat karena hari ini, pemerintah menjual surat utang negara Rp 2,5 triliun. Penjualan obligasi itu diperkirakan akan memicu pasar melepas dolar di sesi akhir. Hari ini rupiah berpeluang berbalik menguat sekitar Rp 9.150 per dolar AS, dengan asumsi dolar gagal menembus level Rp 9.200.

Sementara itu, isu ditundanya divestasi saham pemerintah di PT Bank Negara Indonesia Tbk. tidak akan banyak mempengaruhi rupiah di pasar. Pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi agar proses divestasi saham BNI tidak dipaksakan, Aries menilai, itu bukan merupakan sinyal penundaan, tetapi merupakan langkah konsolidasi internal, karena pembobolan yang diderita bank tersebut.

Pelaku pasar uang lokal ke depan masih terfokus pada susunan kabinet yang akan dibentuk pemerintahan Susilo Bambang

Yudhoyono, kebijakan moneter Amerika Serikat yang diperkeat, dan sistem moneter yuan yang akan digulirkan dalam pertemuan G7 awal Oktober di New York.

Sementara itu, Kepala Riset PT Madani Securities Adjie Martono mengatakan, jika harga minyak terus melambung dan tidak terbendung lagi, pergerakan indeks bisa terjungkal ke jurang yang dalam.

"Penurunan indeks saat ini masih tertahan, karena euforia pasar atas susunan kabinet, terutama tim ekonomi Yudhoyono, yang menurut rencana akan diumumkan pada 20 Oktober mendatang," katanya.

Dia memperkirakan, jika indeks masih berpeluang naik, investor mengalihkan pada saham-saham lapis dua.

"Saham yang tadinya tergo long saham tidur, akan bangkit," katanya.

Untuk transaksi hari ini, indeks masih berfluktuasi di kisaran 809-823. ● muchtar wijaya

45

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGST</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOV</td><td>DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : B 1																																												
TAHUN 2004																																												

Petrosea bagikan dividen interim Rp360 per saham

JAKARTA (Bisnis): Manajemen PT Petrosea Tbk membagikan dividen interim sebesar Rp360 per saham.

Berdasarkan siaran pers yang diterima *Bisnis* disebutkan dengan adanya dividen interim ini maka pembayaran dividen selama lima tahun menjadi sekitar 30%.

Mike Anderson, Presdir Petrosea, mengatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan terakhir, beberapa pemegang saham minoritas meminta bahwa dengan posisi kas perusahaan, perseroan agar membagi dividen.

Menurut dia, Petrosea te-

lah menelaah kebutuhan modal untuk masa yang akan datang sehingga perseroan mempunyai kemampuan untuk membayar dividen interim.

Penelaahan itu, tuturnya, termasuk kebutuhan pembebanan modal untuk beberapa kontrak baru proyek penambangan bersamaan dengan kelanjutan investasi dalam pengolahan air bersih dan *supply base*.

Dengan dibayarnya dividen interim ini, tambahannya, Petrosea masih mempunyai saldo kas sekitar Rp200 miliar dari total aktiva bersih senilai Rp580 miliar. Kini

perseroan tidak mempunyai utang bunga.

Saat ini harga saham Petrosea naik di atas Rp3.000 meskipun masih di bawah nilai aset berwujud sebesar Rp5.600 setelah pembagian dividen interim ini.

Anderson menambahkan tahun ini Petrosea mencatat sejumlah perkembangan seperti dalam kerja sama dengan PT Clough, telah mendapatkan proyek Kodeco KE40 senilai US\$7 juta untuk pemasangan jaringan pipa sepanjang 12 kilometer dan anjungan produksi gas di laut Jawa bagian Timur Laut Pulau Jawa. (wiw)

PERTAMBANGAN

1. Pertambangan Batu Bara																														
PTBA	Tambang	Batubara	Bukit	Asam	Tbk	850	875	850	875	25	2.729.000	2.372.400.000	9,1	875	18.733.500	850	7.295.500
2. Pertambangan Minyak & Gas Bumi																														
APEX	Apexindo	Pratama	Duta	Tbk	335	340	335	340	5	16.000	5.390.000	10,57	340	11.000	335	20.000	
BUMI	Bumi	Resources	Tbk	700	725	700	725	25	12.674.500	9.128.712.500	995,61	725	27.811.000	700	38.135.500		
ENRG	Energi	Mega	Persada	Tbk	475	490	475	485	10	60.359.000	29.220.177.500	25,33	485	2.074.000	480	2.822.000	
MEDC	Medco	Energi	Internasional	Tbk	1.500	1.475	1.475	1.475	-25	820.000	1.209.500.000	9,64	1.475	48.500	1.450	155.000	
3. Pertambangan Logam & Mineral lainnya																														
ANTM	Aneka	Tambang	(Persero)	Tbk	1.350	1.325	1.300	1.300	-50	7.138.000	9.382.725.000	3,31	1.325	439.000	1.300	3.450.000	
INCO	International	Nickel	Ind	Tbk	9.950	9.950	9.900	9.950	-	378.500	3.755.000.000	4,17	9.950	80.000	9.900	268.000	
TINS	Timah	Tbk	2.050	2.050	2.025	2.050	2.050	-	526.000	1.065.475.000	6,22	2.050	224.500	2.025	41.500	
4. Pertambangan Batu-batuan																														
CNKO	Central	Korporindo	Int'l	Tbk	30	40	35	35	5	94.324.500	3.301.607.500	9,88	40	118.055.000	35	102.327.500	
CTTH	Citatah	Industri	Marmer	Tbk	80	80	75	80	-	9.152.500	731.432.500	-3,82	80	2.447.000	75	4.656.500	
5. Lainnya																														
ALDI	Alter	Abadi	Tbk	35	-	-	35	-	-	-	-	-	-0,06	-	-	-	-	-	-	

4/1

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 34 TAHUN 2004

Masihkah Ada Kemilau Emas di Minahasa?

PERUT Bumi Minahasa sudah digali sejak tahun 1887 ketika Netherland Mynbow Maschapai datang ke Lobongan, Totok, Pasolo, Padang, dan Hais. Penambangan emas oleh perusahaan Belanda itu dilakukan secara terbuka, bawah tanah, dan hidrolik berskala kecil.

SEKITAR tahun 1901, Pemerintah Belanda memindahkan masyarakat ke daerah yang lebih datar, tidak jauh dari pesisir pantai. Daerah yang semula dinamai Ratatotok, kini telah berkembang menjadi lima desa, terdiri dari empat desa di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Desa Buyat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow.

Operasi pertambangan Belanda berakhir tahun 1922. Dalam kurun waktu 34 tahun masa penambangan, sedikitnya 5.000 kilogram emas berhasil diangkut oleh perusahaan itu dari kawasan tersebut.

Sepeninggal Netherland Mynbow Maschapai, lubang-lubang galian dikerubungi penduduk setempat, menambang dengan cara yang lebih sederhana. Bahkan ketika PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) memulai eksplorasi pada tahun 1988 hingga tahap penutupan tambang saat ini, penambang tradisional tetap bertahan di kawasan Lobongan dan sekitarnya.

PT NMR adalah perusahaan pertambangan yang 80 persen sahamnya dimiliki oleh Newmont Mining Corporation yang bermarkas di Denver, Colorado, Amerika Serikat (AS). Sementara itu 20 persen lagi dipegang oleh PT Tanjung Sarapung, sebuah perusahaan Indonesia.

Pada tahap eksplorasi, PT NMR menghabiskan biaya 52 juta dollar AS, dan pada tahap konstruksi 150 juta dollar AS. Selama masa operasi tambang, Pemerintah Indonesia mendapat sekitar 300 juta dollar AS, yang diberikan dalam bentuk royalti dan pajak, termasuk keuntungan tak langsung dari barang dan jasa yang dibeli di Indonesia, serta gaji dan tunjangan sekitar 700 orang karyawan asal Indonesia.

Sejak mulai berproduksi pada tahun 1996, hingga operasinya berakhir September 2004, PT NMR mendapatkan sekitar 50 ton emas murni dari Bumi Minahasa.

KEHADIRAN PT NMR memberi keuntungan ekonomi secara langsung kepada Provinsi Sulawesi Utara. Sebesar 60 persen dari total ekspor Sulawesi Utara berasal dari kontribusi perusahaan itu.

Secara tidak langsung, menurut Koordinator Penutupan Tambang PT NMR, Karunia Fajarrini,

masyarakat memperoleh keuntungan dari program pengembangan masyarakat (*community development*) dan pelayanan publik. "PT NMR bertekad melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan secara terpadu di kawasan lingkaran tambang. Pembangunan berkelanjutan berdiri pada tiga pilar dasar, yaitu kinerja

lingkungan, sosial, dan ekonomi," kata Karunia yang menangani program pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan utama program pembangunan berkelanjutan adalah pengembangan ekonomi masyarakat lokal, alih operasi seluruh fasilitas pelayanan publik dari PT NMR kepada pemerintah, pengembangan kapasitas lembaga dan pemerintahan, serta konservasi lingkungan hidup. Untuk program ini PT NMR mengucurkan dana sebesar 1 juta dollar AS (2001-2004).

Sejak tahun 1997, PT NMR telah mengalokasikan dana operasional tahunan sebesar 330.000 dollar AS untuk program pengembangan masyarakat dan hubungan masyarakat. Program ini meliputi pengembangan infrastruktur, jalan, sistem pasokan air, dan irigasi skala kecil, fasilitas tingkat desa (perbaikan gedung sekolah dan pembangunan kantor pe-

merintah, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), perpustakaan desa, dan pasar), perawatan kesehatan kuratif bagi masyarakat, berbagai pelatihan dan penyadaran dan perbaikan lingkungan (rehabilitasi bakau dan pembuatan terumbu karang atau *reef ball*), pengembangan organisasi nelayan, dan pelatihan usaha kecil.

PT NMR telah menghabiskan

tahun untuk pembangunan dan perawatan jalan sepanjang rute pantai selatan, yang menghubungkan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tahun 1999 dibangun sebuah sistem air bersih untuk Desa Buyat, yang sebelumnya dipasok secara reguler menggunakan truk tangki. Sistem air bersih yang dibangun dengan biaya Rp 500 juta itu mengalami kendala ketika diserahkan pengelolaannya kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Warga yang sebelumnya diberi air bersih secara cuma-cuma, menyatakan keberatan ketika harus membayar jasa kepada PDAM sebagai pihak pengelola.

Di samping merehabilitasi gedung sekolah yang sudah ada di Ratatotok maupun Buyat, PT NMR telah membangun delapan balai desa di Desa Basaan, Belang, Buyat, dan Ratatotok, serta kantor Kecamatan Ratatotok dan kantor polisi.

Puskesmas satu-satunya di Ratatotok yang melayani desa-desa sekitarnya dibiayai pembangunan dan pengadaan fasilitas pendukungnya. Perusahaan menyediakan dana bulanan untuk seluruh pengobatan di puskesmas tersebut.

Tidak sulit mengenali seluruh sarana dan fasilitas yang dibangun PT NMR. Hampir setiap sudut desa ditemukan plang be-

ton yang menunjukkan fasilitas itu sebagai sumbangan PT NMR.

Selain itu, PT NMR memberikan dana abadi sebanyak 1,5 juta dollar AS sebagai modal awal kepada Yayasan Minahasa Raya, yang kelak dijadikan investasi pascapenutupan tambang. Yayasan itu didirikan tahun 2000 oleh PT NMR dan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

"Anggaran operasional yayasan diambil dari bunga dana abadi, yang akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pengembangan masyarakat yang berkelanjutan setelah penutupan tambang. Perusahaan tetap akan mendanai kegiatan pemantauan lingkungan dan sosial-ekonomi pascapenutupan tambang di areal tambang dan sekitarnya," papar Karunia.

Ia menambahkan, program pembangunan yang berkelanjutan secara terpadu (*Integrated Sustainable Development Program*) merupakan komponen terpenting dari keseluruhan kegiatan dalam tahap penutupan tambang. Program itu mencakup pelatihan pertanian, agro-kehutanan, dan perikanan.

Program pembangunan berkelanjutan atau ISDP agaknya menjadi taruhan bagi PT NMR, demi keberlanjutan eksploitasi Newmont Mining Corporation di Indonesia, bahkan di belahan lain Bumi ini. Di Indonesia, di samping PT NMR yang telah memasuki tahap tutup tambang (*mine closure*), Newmont juga beroperasi di Nusa Tenggara Barat (PT Newmont Nusa Tenggara) dan di Sumatera Utara (PT Newmont Horas Nauli). Newmont masih membutuhkan lisensi sosial dari masyarakat di sekitar wilayah kontrak karyanya.

Kita tunggu saja, apakah masih ada kemilau "emas" yang akan tersisa di Minahasa setelah Newmont pergi.

(NASRU ALAM AZIZ)